



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOH. KHUAILID
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
3. NHK : 970789

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	1.030.000.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/210 m2 di KAB / KOTA CIREBON, Rp. 400.000.000		
2.	Tanah Seluas 582 m2 di KAB / KOTA CIREBON, Rp. 80.000.000		
3.	Tanah Seluas 272 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
4.	Tanah Seluas 561 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
5.	Tanah Seluas 315 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	407.000.000
1.	MOTOR, HONDA AFX12U21C08 MT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2.	MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	28.150.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	864.087.000
F. HARTA LAINNYA		Rp.	----
Sub Total		Rp.	2.329.237.000
III. HUTANG		Rp.	1.180.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.149.237.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.